

KPK Panggil 2 Kadis Terkait Kasus Pencucian Uang Bupati Probolinggo

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (23/2), memanggil 11 saksi dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS). Dari 11 saksi itu, dua di antaranya merupakan kepala dinas (kadis). Adapun dua saksi kepala dinas yang dipanggil itu, yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Shodiq Tjahjono dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi. "Hari ini (kemarin, Red), pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, TPPU, dan gratifikasi untuk tersangka PTS," kata Plt Juru Bicara

KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/2). Sementara sembilan saksi lainnya yang dipanggil, yakni Muhklas P Ilhafa selaku pedagang, Rohayu selaku pedagang, Dini Rahmania selaku wiraswasta, Bayu Widya Tantra dari pihak Polri, Ismail Slamet Marlianto selaku wiraswasta, karyawan swasta Saifuddin, Ahmad Rifai selaku wiraswasta, Nanik Melani dari pihak swasta, dan pegawai BUMN Ayu Retsi Lestari. Ali mengatakan pemeriksaan 11 saksi itu dilakukan di Polres Probolinggo Kota. Dalam penyidikan kasus dugaan pencucian uang itu, KPK juga telah menyita berbagai tanah dan bangunan serta aset nilai ekonomis lainnya dengan jumlah seluruhnya senilai sekitar Rp 50 miliar. Adapun aset-aset yang telah disita sebagai berikut. Pertama, tanah dan bangunan

yang berlokasi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo. Kedua, tiga bidang tanah yang berlokasi di Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Ketiga, satu bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan/Desa Alaskandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Keempat, satu bidang tanah yang berlokasi di Desa Sumberlele, Kecamatan

Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Puput bersama suaminya, yaitu anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo yang sebelumnya juga menjerat dua orang itu sebagai tersangka.

Terkait kasus suap, Puput dan suaminya saat ini sudah berstatus terdakwa dan sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Keduanya didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 11 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (ant/opi)



TETAP MODIS: Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dalam pusran kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Kampus Merdeka
AKREDITASI UNGGUL
PRODI S1 & D3

JADILAH BAGIAN DARI SEKOLAH TINGGI TERBAIK

PERINGKAT 1

**SE-JAWA
TIMUR**

DIBUKA PENDAFTARAN PERIODE FEBRUARI

31 Januari 2022 - 26 Februari 2022

**PRODI DIPLOMA TIGA
GRATIS KURSUS BREVET A DAN B**

- D3 MANAJEMEN PAJAK (AKREDITASI UNGGUL)
- D3 AKUNTANSI (AKREDITASI UNGGUL)

PRODI STRATA SATU

- S1 AKUNTANSI (AKREDITASI UNGGUL)
- S1 MANAJEMEN (AKREDITASI UNGGUL)

TES MASUK
27 Februari 2022

PENGUMUMAN
01 Maret 2022

HER REGISTRASI
2 Maret - 16 Maret 2022

Nilai Raport Rata-Rata 8
BEBAS TES!!

Dapatkan Kesempatan Mendapatkan
BEASISWA

Informasi Lebih Lanjut (WA) +62 853-2825-4582

Pendaftaran Online: pmb.stiesia.ac.id

[stiesiasurabaya](https://www.instagram.com/stiesiasurabaya)
[stiesia.surabaya](https://www.facebook.com/stiesia.surabaya)
[stiesia.surabaya](https://www.youtube.com/channel/UCstiesia)

KIPRAH DPRD JATIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

BAHAS KEBERSIHAN: Komisi D DPRD Jatim saat kunjungan kerja ke Kabupaten Blitar membahas pembangunan TPA Sampah.

Komisi D Minta TPA Sampah di Kabupaten Blitar Segera Direalisasikan

INDRAPURA – Komisi D DPRD Jawa Timur berharap agar pembangunan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah di Kabupaten Blitar, segera direalisasikan. Karena itu Pemprov Jatim dan Pemkab Blitar harus merumuskan ini. Dan masyarakat harus terlibat karena TPA harus memberikan ruang masyarakat ikut terlibat aktif," katanya.

Sementara itu dari hasil diskusi antara Komisi D DPRD Jawa Timur dan Pemkab Blitar disebutkan salah satu opsi pembangunan TPA terpadu di Blitar adalah dengan konsep *sanitary land field*. Nantinya, limbah dari hasil pengolahan sampah bisa dijadikan untuk bahan bakar briket untuk pengganti batu bara.

Menurut rencana TPA akan dibangun di atas lahan Perhutani Petak 111. Lokasinya di perbatasan antara Pandanarum dan Wonotirto. Satib berharap dengan diselesaikannya revisi Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Sampah Regional dari DPRD Jawa Timur nantinya akan mempercepat tindak lanjut pembangunan TPA di empat wilayah tersebut, termasuk di Kabupaten Blitar.

Saat ini Komisi D DPRD Jatim sedang mencari masukan dari berbagai kalangan untuk segera menyelesaikan Raperda tersebut menjadi sebuah Perda. Sehingga, nantinya bisa dilanjutkan dengan mempercepat pembangunan TPA di empat wilayah tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jatim lainnya, Khofidah meminta kepada kabupaten/kota di Blitar serta Provinsi Jatim harus memiliki semangat yang gregat untuk menyelesaikan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu ini. Sehingga permasalahan pembangunan pengelolaan sampah bisa terselesaikan. "Setelah pertemuan ini, Komisi D DPRD Jatim akan melakukan FGD (focus group discussion) di lima Bakorwil untuk menyatukan persepsi bersama kabupaten/kota untuk menyelesaikan revisi Perda Sampah Regional tersebut," pungkas Khofidah yang merupakan politisi asal Fraksi PKB ini. (mus/opi)

Komisi E Dorong Dinas Pendidikan Jatim Bentuk Tim Percepatan Aset Lahan SMA/SMK

INDRAPURA - Komisi E DPRD Jawa Timur menyoroti adanya temuan aset lahan sekolah SMA/SMK yang masih bermasalah. Salah satunya terjadi di SMK Negeri 2 Kota Batu, karena masih tercatat sebagai aset Desa Pandan Rejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Ba-faqih mengatakan, masih banyak permasalahan aset sekolah yang belum terurai, salah satunya di SMKN 2 Kota Batu. Sekolah tersebut hingga kini belum memiliki sertifikat atas lahan yang ditempatinya. "SMKN 2 Batu ini tanahnya sudah di-perdes-kan, isinya perdes itu bukan semuanya, sebagian. Sekitar 9 ribuan meter persegi sudah diserahkan ke pemkot. Tapi kan SMA/SMK ini kewenangannya provinsi," ujar Hikmah.

Untuk diketahui, lahan SMKN 2 Kota Batu ini berada di atas lahan kas desa. Karenanya, hingga saat ini lahan sekolah tersebut belum tersertifikatkan atas

JARING ASPIRASI: Komisi E DPRD Jatim saat kunjungan kerja di Kota Batu.

nama sekolah terkait. Padahal, kata Hikmah, kejelasan penguasaan aset, termasuk lahan yang telah dibangun sekolah ini penting. Terutama ketika sekolah akan mendapatkan bantuan dana alokasi khusus (DAK), baik dari APBN maupun bantuan dari APBD. "Problem tentang kepemilikan lahan berimplikasi tentang banyak hal bagi se-

cabang dinas pendidikan dan mendapati hal seperti ini. Kami sudah minta Dinas Pendidikan untuk melakukan asesmen total," ungkapnya.

Asesmen tersebut, lanjut Himah, untuk memudahkan pendekatan penyelesaian masalah aset tersebut. Mengingat setiap kasus memiliki karakteristik berbeda. "Hasil asesmen itu akan kami bawa di rakor Komisi E, Dinas Pendidikan dan BPN dengan biro hukum dan mungkin dinas terkait, dan pemerintah kabupaten/kota terkait. Sehingga respons kita jelas, didasarkan dengan peraturan perundang-undangan," urainya.

Khusus di SMKN 2 Kota Batu, Hikmah menyampaikan, perlu juga pendekatan ke warga untuk menjelaskan duduk permasalahan masalah ini. Karena stigma di masyarakat sudah berbeda. "Ini permasalahannya pemerintah dengan pemerintah," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi E DPRD Jatim lainnya Sri Untari Bisowarno. Ia mengaku juga siap ikut retribusi dengan pemerintah desa agar masalah ini cepat selesai. Karena keikhlasan warga terhadap berjalannya pendidikan di Kota Batu adalah bentuk nasionalisme kepada negara yang patut dihormati. "Saya siap ikut retribusi dengan warga desa, termasuk membantu memfasilitasinya ke wali kota Batu supaya segera ada titik temu yang tidak melanggar aturan," pungkas Sri Untari. (mus/opi)

SEMANGAT: Komisi E DPRD Jatim dengan semangat tinggi membahas persoalan di SMA/SMK, termasuk soal aset lahan.

layouter: Bella Desta